
Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang (PKPPR) Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kecamatan Medan Belawan

¹Nurfida Rahmadani, ²Siti Hazzah Nur. R

Universitas Sumatera Utara

Email: fiiddaa09@gmail.com, sitihazzah@usu.ac.id

Abstract

Medan Belawan District is one of the slum areas in Medan City that faces serious problems, particularly inadequate drainage conditions and limited access to clean water. This situation contradicts the objectives of the Slum-Free City Program (KOTAKU), which is under the coordination of the Housing, Settlement and Spatial Planning Agency (PKPPR). This study aims to examine the PKPPR Agency's strategy in minimizing slums through the implementation of the KOTAKU Program in Medan Belawan. The study used a descriptive method with a qualitative approach through interviews, observation, documentation, and literature study. Data analysis refers to Kotten's strategy indicators, namely organizational strategy, program, resource support, and institutional. The results show that the organizational strategy is carried out through collaboration between the PKPPR Agency, the Public Works Agency, and the sub-district in managing drainage. The program strategy includes the construction of drilled wells in Belawan I Sub-district to meet clean water needs. Resource support strategies include the utilization of Regional Original Revenue (PAD), transfer funds, and drainage experts. The institutional strategy is realized through the socialization of sanitation and drainage management to the community.

Keyword: *Slum-Free City, Strategy, Drainage, Clean Water*

Abstrak

Kecamatan Medan Belawan merupakan salah satu kawasan permukiman kumuh di Kota Medan yang menghadapi persoalan serius, terutama kondisi drainase yang tidak layak dan minimnya akses air bersih. Situasi ini bertentangan dengan tujuan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), yang berada di bawah koordinasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR). Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi Dinas PKPPR dalam meminimalisir kekumuhan melalui implementasi Program KOTAKU di Medan Belawan. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data mengacu pada indikator strategi Kotten, yakni strategi organisasi, program, dukungan sumber daya, dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi organisasi dilakukan melalui kolaborasi Dinas PKPPR, Dinas PU, dan kelurahan dalam menangani drainase. Strategi program mencakup pembangunan sumur bor di Kelurahan Belawan I untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Strategi pendukung sumber daya meliputi pemanfaatan PAD, dana transfer, dan tenaga ahli drainase. Adapun strategi kelembagaan diwujudkan melalui sosialisasi sanitasi dan pengelolaan drainase kepada masyarakat.

Kata Kunci: Kota Tanpa Kumuh, Strategi, Drainase, Air Bersih

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat nomor 4 di dunia pada tahun 2022 mengenai masalah kepadatan penduduk dengan total jumlah penduduk 278 juta jiwa (*Census.gov*, 2022). Kepadatan penduduk di Indonesia dipengaruhi salah satunya dikarenakan tingginya tingkat kelahiran serta rendahnya angka kematian sehingga jumlah penduduk yang begitu besar di Indonesia menjadi permasalahan serius terutama di perkotaan. Permukiman kota yang memiliki penduduk padat sering kali menjadi permasalahan pembangunan dan juga tidak tertata dengan baik. Pembangunan yang tidak tertata dengan baik di perkotaan menyebabkan rendahnya kualitas infrastruktur yang memicu kawasan permukiman kumuh. Sebagaimana yang dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman berikut ini:

“Permukiman kumuh adalah tipe permukiman yang dinilai tidak layak huni akibat ada kondisi ketidakteraturan bangunan, tingginya derajat kepadatan bangunan, kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan perumahan kumuh merupakan perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.”

Kawasan permukiman kumuh yang dibiarkan begitu saja memiliki dampak negatif. Dampak negatif dari kawasan permukiman kumuh berdasarkan pendapat Srinivas (2015) dalam Mulyadi dan Ramdani (2021:64) berpendapat, “Permasalahan permukiman kumuh yang meluas mempunyai dampak negatif seperti kualitas lingkungan yang rendah, masalah kesehatan, limbah domestik, masalah drainase persampahan dan kerusakan citra kota dan masalah lain yang berkaitan dengan tata ruang kota”. Mengatasi permasalahan kawasan permukiman kumuh, pemerintah membuat program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU juga dibuat untuk memenuhi *transforming Our World 2030* agenda

Sustainable Development Goals (SDGs) pada tujuan ke-11 menekankan pentingnya menyediakan perumahan yang layak, aman, terjangkau, serta layanan dasar bagi seluruh masyarakat, termasuk penataan kawasan kumuh. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menjadi instrumen untuk mendukung gerakan *100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak* sebagai upaya strategis Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR dalam mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan.

Program KOTAKU dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh. Tujuan program ini, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Cipta Karya No. 40.SE/DC/2016, tidak hanya menangani kawasan kumuh yang sudah ada, tetapi juga mencegah munculnya kekumuhan baru melalui peningkatan akses infrastruktur permukiman dan layanan dasar. Dengan demikian, KOTAKU diarahkan untuk mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni, aman, produktif, dan berkelanjutan. Sebagai program nasional, KOTAKU dijalankan melalui dukungan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberlanjutannya. Berdasarkan *kotaku.pu.go.id* (2022), lokasi tahun anggaran KOTAKU mendapatkan alokasi anggaran dana. Selain itu, bantuan pemerintah untuk masyarakat juga berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*) serta dari Lembaga mitra seperti *World Bank-WB; Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB dan Islamic Development Bank-IsDB*.

Namun, meskipun telah ada program KOTAKU, masih banyak ditemui kawasan permukiman kumuh di setiap Provinsi yang ada di Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karina dkk (2021) bahwa pada program KOTAKU kawasan Kota Jakarta Barat masih banyak tersebar bangunan yang tidak tertata dan kepadatan

penduduk yang membuat suatu kawasan menjadi kumuh, masih tidak tersedianya jaringan drainase yang membuat kawasan menjadi sering banjir, dan pembuangan air limbah serta sanitasi di setiap rumah tangga yang tidak terkelola dan langsung dialirkan ke sungai karena tidak tersedianya septic tank. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Saleh Dapit (2021) bahwa meski adanya program KOTAKU, namun masih banyak kawasan kumuh yang perlu penanganan karena adanya urbanisasi dan masih banyak masyarakat yang tinggal di tanah milik pemerintah, di pinggir kereta dan sungai yang tidak jelas kepemilikannya serta ketersediaan lahan yang kurang dalam membangun sarana dan prasarana. Untuk mengetahui luasan kumuh yang masih tersebar dapat dilihat berdasarkan hasil riset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berisi luasan kumuh di Indonesia pada tahun 2020 sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Kawasan Kumuh Tahun 2020 di Indonesia

Provinsi	Luas Area KM²
Aceh	5786,88
Sumatera Utara	6206,39
Sumatera Barat	1896,12
Riau	1152,61
Jambi	1373,44
Sumatera Selatan	3607,36
Bengkulu	786,36
Lampung	2023,51
Kepulauan Bangka Belitung	648,7
Kepulauan Riau	823,71
DKI Jakarta	1190,90
Jawa Barat	4572,35
Jawa Tengah	8912,33
D.I. Yogyakarta	406,4
Jawa Timur	1797,76
Banten	1371,38
Bali	484,72
Nusa Tenggara Barat	1927,55
Nusa Tenggara Timur	756,4
Kalimantan Barat	3426,5
Kalimantan Tengah	1751,45
Kalimantan Selatan	3271,44
Kalimantan Timur	1154,12
Kalimantan Utara	317,13
Sulawesi Utara	561,2
Sulawesi Tengah	25155,2
Sulawesi Selatan	2190,65
Sulawesi Tenggara	1445,12
Gorontalo	258,88
Sulawesi Barat	224,77
Maluku	301,39
Maluku Utara	707,67
Papua Barat	556,51
Papua	707,86

Sumber: data.pu.go.id, 2020

Berdasarkan data pada Tabel 1. permasalahan kawasan kumuh di Indonesia dapat dikatakan penyebarannya masih luas. Salah satunya yang dapat dilihat di daerah Sumatera Utara dengan luas 6206,39 KM². Permasalahan kumuh di daerah Sumatera Utara dapat dilihat di Kota Medan tepatnya di Kecamatan Medan Belawan. Hal ini disebabkan karena kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terbanyak di Kota Medan. Berdasarkan data *bps.go.id* (2022), data kepadatan penduduk Kota Medan yakni:

Tabel 2 Kepadatan Penduduk Kota Medan

Kecamatan	Kepadatan Penduduk	Kepadatan Penduduk Jiwa/KM ²
Medan Tuntungan	98.661 Jiwa	4.766 Jiwa/KM ²
Medan Johor	154.096 Jiwa	10.569 Jiwa/KM ²
Medan Amplas	130.882 Jiwa	11.696 Jiwa/KM ²
Medan Denai	171.908 Jiwa	18.995 Jiwa/KM ²
Medan Area	118.710 Jiwa	21.505 Jiwa/KM ²
Medan Kota	85.563 Jiwa	6.232 Jiwa/KM ²
Medan Maimun	50.063 Jiwa	16.800 Jiwa/KM ²
Medan Polonia	60.389 Jiwa	6.702 Jiwa/KM ²
Medan Baru	36.543 Jiwa	6.358 Jiwa/KM ²
Medan Selayang	103.208 Jiwa	8.057 Jiwa/KM ²
Medan Sunggal	103.193 Jiwa	8.057 Jiwa/KM ²
Medan Helvetia	166.332 Jiwa	12.639 Jiwa/KM ²
Medan Petisah	72.587 Jiwa	10.643 Jiwa/KM ²
Medan Barat	90.156 Jiwa	16.915 Jiwa/KM ²
Medan Timur	117.314 Jiwa	15.118 Jiwa/KM ²
Medan Perjuangan	104.432 Jiwa	25.533 Jiwa/KM ²
Medan Tembung	147.209 Jiwa	18.424 Jiwa/KM ²
Medan Deli	190.822 Jiwa	9.157 Jiwa/KM ²
Medan Labuhan	135.589 Jiwa	3.698 Jiwa/KM ²
Medan Marelan	186.391 Jiwa	7.825 Jiwa/KM ²
Medan Belawan	109.908 Jiwa	4.187 Jiwa/KM ²

Sumber: bps.go.id, 2022

Berdasarkan Tabel 2 bahwa kepadatan penduduk Kecamatan Medan Belawan, yaitu 10.908 jiwa dan menjadikan Medan Belawan sebagai salah satu kecamatan yang padat akan penduduk di Kota Medan dengan sebaran jiwa 4.187 Jiwa/KM². Dengan kepadatan penduduk tersebut, Kecamatan Medan Belawan masuk sebagai kriteria kawasan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan aspek tingkat kepadatan penduduk yang mempengaruhi perluasan kekumuhan. Kekumuhan ini juga dapat dilihat berdasarkan data luasan kumuh di Kecamatan Medan Belawan.

Adapun luasan kumuh yang masih tersebar di Kecamatan Medan Belawan dapat dilihat berdasarkan hasil riset peneliti di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan (PKPPR) berikut ini:

Tabel 3 Sebaran Kumuh di Kecamatan Medan Belawan

No	Kelurahan	Luasan Kumuh
1	Belawan Bahagia	21,2 Ha
2	Belawan I	8,87 Ha
3	Belawan II	34,67 Ha

4	Bagan Deli	15,62 Ha
5	Belawan Bahari	13,15 Ha
6	Belawan Pulau Sicanang	24,53 Ha
Total		118,04 Ha

Sumber: Diolah Peneliti Dari Data Dinas PKPPR, 2022

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa Kecamatan Medan Belawan mempunyai total luasan kumuh 118,04 Ha dan yang paling terluas berada di Kelurahan Belawan II dengan luasan 34.67 Ha. Berbagai masalah kumuh di Kecamatan Medan Belawan dapat diukur berdasarkan definisi kumuh dari Surat Edaran Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 40.SE/DC/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Kotaku, yaitu dengan 2 poin. Pertama, kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kedua, kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat seperti jalan lingkungan yang rusak, drainase lingkungan yang tidak layak, kurangnya penyediaan air bersih/minum, masalah persampahan, pengolahan air limbah/sanitasi yang tidak layak, dan kurangnya pengamanan kebakaran. Adapun Permen PUPR NO 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menambahkan poin kekumuhan, yaitu berkaitan dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan, dalam program KOTAKU peneliti memfokuskan dalam penelitian di bidang drainase, pengolahan limbah atau sanitasi dan sistem air bersih.



Gambar 1.1 Potret Banjir di Kecamatan Medan Belawan Sumber *hariansib.com*, 2022

Berbagai sumber menunjukkan bahwa Kecamatan Medan Belawan merupakan kawasan yang sangat kumuh. Kompas.com (2022) menyebutkan bahwa wilayah ini kerap mengalami banjir akibat drainase yang tidak layak dan pasang laut tahunan. Hal ini sejalan dengan laporan viva.co.id (2022) bahwa sekitar 20 ribu KK terdampak banjir rob dan hujan karena minimnya saluran air. Camat Medan Belawan, Subhan Fajri, juga menegaskan bahwa banjir setinggi 30–50 cm terjadi di enam kelurahan dan meminta dukungan pembangunan drainase melalui Program KOTAKU. Penelitian Alamsyah Bhakti (2018) turut memperkuat bahwa banjir di Kota Medan umumnya akibat saluran drainase yang tidak layak dan mengalami pendangkalan, terutama di kawasan pesisir seperti Belawan. Permasalahan drainase juga terlihat pada proyek KOTAKU di Kelurahan Belawan II yang justru merusak pipa PDAM Tirtanadi, menyebabkan air minum warga menjadi keruh (dnaberita.com, 2019). Warga setempat, Eman (43), mengeluhkan bahwa kebocoran pipa terjadi akibat galian drainase.

Selain drainase, kekumuhan Belawan juga dipicu oleh sanitasi buruk dan keterbatasan air bersih. Banyak warga yang bekerja sebagai nelayan masih melakukan pembuangan sampah rumah tangga, MCK, dan BABS di muara sungai karena kurangnya fasilitas sanitasi (bombastis.com,

2022). Bahkan di Kelurahan Bagan Deli terdapat 1.795 keluarga berisiko stunting akibat sanitasi tidak layak dan perilaku MCK serta BABS di sungai (sumut.voi.id, 2022). Berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan, permasalahan sanitasi tersebut diperkuat oleh penelitian terdahulu (Ritonga dan Susilawati, 2022) bahwa sanitasi wilayah Medan Belawan dimana sebagian besar masyarakatnya tidak mempunyai tempat pembuangan tinja/kotoran yang layak. Masyarakat mendirikan toilet/MCK diatas bantaran sungai yang langsung mengalir ke laut. Menurut Susilawaty, A (2018:97) berpendapat “*Sarana sanitasi dasar di masyarakat harus selalu terpenuhi upaya sanitasi dasar meliputi penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia (jamban) dan saluran pembuangan air limbah*”.

Krisis air bersih juga menjadi permasalahan di Kecamatan Medan Belawan, hal ini berbanding terbalik dengan slogan program KOTAKU yang mendukung gerakan 100% akses air minum layak. Berdasarkan *hariansib.com* (2020) bahwa masyarakat Kecamatan Medan Belawan masih mengeluhkan persoalan air bersih yang tidak maksimal, masyarakat masih mengeluhkan kualitas air yang layak untuk mereka. Pernyataan tersebut diperkuat oleh media lain, *kumparan.news.com* (2020) bahwa ratusan warga Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan sulit mendapatkan pasokan air bersih akibatnya banyak warga yang harus membeli air dari warga lain yang memiliki sumur bor atau membeli dari air mineral isi ulang. Berbeda halnya dengan yang dirasakan warga Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan, berdasarkan *matatelinga.com* (2020), sekitar 13 ribu warga Kelurahan Sicanang mengeluh karena air yang tidak bisa dikonsumsi. Air yang ada di Kelurahan Sicanang bercampur pasir dan berbau karat serta berlumut dan sulit mendapatkan akses air bersih, sehingga banyak masyarakat yang membeli air isi ulang.

Hal ini diperkuat oleh penelitian terdahulu Ritonga dan Susilawati (2022) bahwa masyarakat Kecamatan Medan Belawan untuk sumber air masih menggunakan air sungai untuk mencuci dan mandi sementara untuk minum dan memasak masyarakat menggunakan air yang di beli berupa air isi ulang tanpa melakukan proses memasak hingga mendidih. Hal ini menyebabkan penyakit seperti diare, penyakit kulit, stunting dan penyakit lainnya. Berdasarkan website *who.int* dari website resmi *WHO*, bahwa air bersih dikatakan sebagai air yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan domestiknya, seperti konsumsi, air minum dan sanitasi. Sementara syarat air bersih menurut *WHO* yaitu, ciri utama air bersih adalah tidak berwarna karena salah satu ciri-ciri air yang cukup aman untuk dikonsumsi dan kebutuhan sehari hari tampak jernih dan jika airnya keruh serta memiliki warna kuning atau coklat maka air tersebut sudah terkontaminasi oleh zat limbah.

Ciri kedua air bersih adalah tidak memiliki rasa dan jika terasa asin atau terasa metalik (logam) saat diminum maka dapat disimpulkan air tersebut bukanlah air bersih, jika memiliki rasa seperti logam maka terdapat karat besi di saluran pipa atau sumber mata air tanah. Karakteristik ketiga yaitu air tidak memiliki bau, apabila terdapat bau seperti air klorin atau logam maka air tersebut terdapat zat-zat kimia yang berbahaya dan tidak layak masuk ke dalam tubuh. Ciri terakhir adalah Ph air yang netral yang merupakan salah satu persyaratan kimia yang umum dalam penguluran kualitas air.

Selain itu, masyarakat Medan Belawan masih menggunakan sumur bor untuk mengonsumsi air minum dan mandi sementara Sungai Belawan sudah mengalami pendangkalan yang kerap sekali terjadi banjir. Hal itu menyebabkan limbah domestik dan industri yang dibawa air sungai mencemari sumur bor yang dibangun. (*sentralberita.com*, 2019). Tercampurnya sumber air minum dengan limbah dapat menyebabkan penyakit seperti stunting dan diare karena sanitasi yang tidak layak untuk pengelolaan limbah. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Saskia Ani dan

Jumiatai (2020) dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat masih kurang mengenai pentingnya sanitasi sebagai penyediaan sarana dan pelayanan untuk pembuangan limbah yang berasal dari manusia misalnya urin dan feses.

Selain itu, sanitasi juga bisa merujuk pada pemeliharaan kondisi yang bersih, pengelolaan sampah, dan pengolahan limbah cair. Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Franky (2019) bahwa kultur masyarakat Kecamatan Medan Belawan juga menjadi permasalahan sebab pengelolaan limbah atau kotoran masyarakat melalui *septic tank* yang dibangun masyarakat tidak sesuai standar dan selalu terjadi kebocoran, masyarakat juga mengalirkan limbah *septic tank* ke laut sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengakibatkan kesehatan masyarakat menurun karena terpapar bakteri *Escherichia coli*. Permasalahan Program KOTAKU juga menyangkut pelaksanaan yang sudah dilakukan di Kecamatan Medan Belawan. Pelaksanaan ini dilakukan tahun 2018 dan Program KOTAKU menyerap Anggaran Pembelanjaan Daerah Nasional (APBN) sebesar 27 M. Sayangnya, kekumuhan di Kecamatan Medan Belawan tepatnya Kelurahan Sicanang masih tampak kumuh. Sejumlah tokoh pemuda masyarakat Belawan mengatakan bahwa 11 lingkungan di Kecamatan Medan Belawan akan dibangun melalui KOTAKU, tetapi tidak memberikan efek kepada masyarakat, Belawan merupakan daerah pesisir namun program tersebut tidak membangun drainase untuk pencegahan air pasang. Lain halnya jika program tersebut hanya digunakan untuk peninggian jalan di mana masyarakat sekitar mengatakan pengecoran jalan tidak akan berdampak banyak pada air pasang, mereka membutuhkan adanya drainase (*sumutpos.jawa.com*, 2018).

Tahun 2020 di Kelurahan Bagan Deli dan Belawan I, masyarakat menilai pelaksanaan Program Kotaku melalui proyek pembangunan *septic tank* dan sumur bor dinilai tidak ada manfaatnya. *Septic tank* yang dibangun tidak dapat menampung kotoran manusia dan tidak masuk ke dalam *septic tank* sehingga apabila terjadi banjir maka kotoran manusia akan sampai ke jalan raya (*snipers.news*, 2021). Berdasarkan *pab-indonesia.co.id* (2020), Masyarakat Belawan I mengeluh dengan Program KOTAKU yang dikerjakan pasalnya pembangunan *septic tank* yang merusak jalan tidak rampung dan ketika dikonfirmasi harus menunggu aliran dana selanjutnya. Masyarakat juga membutuhkan air bersih dari Program KOTAKU namun masih belum terlaksana. Melalui masalah-masalah kekumuhan di Kecamatan Medan Belawan yang telah dipaparkan peneliti maka dapat diketahui bahwa pada faktanya program KOTAKU telah di realisasikan di Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 640/039.K/I/2015, kemudian diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 640/06.K/XII/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Medan, diteruskan melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Medan. Namun, untuk Program KOTAKU ini belum tampak terwujud dan masih banyak temuan-temuan negatif maupun keluhan masyarakat Kecamatan Medan Belawan mengenai Program KOTAKU.

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) yang sebagian besar melaksanakan realisasi program KOTAKU. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor 050/08.K/III/2021 Tentang Kelompok Kerja Perumahan Kawasan Permukiman Kota Medan (POKJA PKP), pelaksanaan KOTAKU untuk mewujudkannya paling banyak diampu oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) dan Kepala Dinas PKPPR sebagai wakil ketua POKJA PKP. Adapun dalam pelaksanaannya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) sebagai kordinator dan pelaksana program KOTAKU dengan

meliputi kewenangan perencanaan program sebagai anggota, pelaksanaan ketersediaan air minum sebagai koordinator pelaksana, pengelolaan air limbah koordinator pelaksana, dan tata ruang perumahan kawasan permukiman sebagai koordinator pelaksana.

Selain itu dinas PKPPR dalam merencanakan strategi program KOTAKU merujuk pada Rencana Strategi Direktorat Jendral Cipta Karya 2020-2024 yang memuat strategi nasional dalam menangani kawasan kumuh melalui program KOTAKU. Strategi tersebut menargetkan penanganan kawasan kumuh dan mendorong tercapainya 100% air minum layak serta 90% akses sanitasi layak bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Melalui RENSTRA ini dalam mengatasi kawasan kumuh dijalankan dengan 3 pilar yaitu, penguatan sistem berbasis peran masyarakat, penguatan kemandirian pemerintah daerah, penerapan teknologi dan inovasi. Dalam konteks Medan Belawan, strategi tersebut sangatlah relevan mengingat masih banyak wilayah yang tergolong kumuh dan minim infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi dan drainase.

Namun, meskipun sudah ditetapkan, Program KOTAKU di Kota Medan masih terdapat berbagai masalah khususnya di Kecamatan Medan Belawan. Melalui fenomena yang telah peneliti paparkan maka peneliti ingin mengkaji bagaimana strategi Dinas PKPPR sebagai pengampu terbanyak dalam mewujudkan atau menyukseskan program KOTAKU. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji bagaimana strategi Dinas PKPPR melalui program KOTAKU dengan 4 (empat) indikator Korten (1997:22), yaitu Strategi Organisasi, Strategi Program, Strategi Pendukung Sumber Daya, dan Strategi Kelembagaan. Berdasarkan hal di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Medan Belawan.”

Metode Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami secara mendalam berbagai persoalan kekumuhan yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan, sehingga peneliti memilih menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut (Creswell, 2016) penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang dikonstruksi individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial. Proses penelitian melibatkan penyusunan pertanyaan, pengumpulan data langsung dari partisipan, analisis data secara induktif, serta interpretasi terhadap makna temuan. Penelitian kualitatif juga menekankan penilaian subjektif terhadap sikap, pendapat, dan perilaku yang muncul dari fenomena yang diteliti (Kothari, 2004). Sejalan dengan itu, Moleong (2006) menegaskan bahwa penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena secara holistik melalui deskripsi berbasis kata-kata dalam konteks yang alamiah.

Lokasi penelitian ditetapkan pada dua tempat, yaitu Dinas PKPPR Kota Medan dan Kecamatan Medan Belawan. Pemilihan lokasi pertama didasarkan pada peran Dinas PKPPR sebagai pelaksana Program KOTAKU. Sementara itu, Kecamatan Medan Belawan dipilih karena masih menghadapi persoalan kekumuhan yang kompleks, termasuk sarana dan prasarana permukiman yang tidak memadai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan kebutuhan penelitian, seperti pejabat dinas, perangkat kecamatan, tenaga ahli, dan masyarakat penerima maupun nonpenerima manfaat program.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan sepanjang proses penelitian untuk memfokuskan dan merangkum informasi relevan.

Penyajian data dilakukan melalui uraian naratif dan penyusunan pola hubungan antar kategori. Penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang untuk memastikan temuan benar-benar valid. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu guna meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, dan objektivitas hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang (Pkppr) Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kecamatan Medan Belawan

Menurut Munthe (2015), program merupakan upaya yang dilakukan organisasi untuk menghasilkan perubahan dan dampak tertentu. Karena itu, strategi program sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Kotten dalam Melyani dkk. (2022) menekankan bahwa strategi program harus mempertimbangkan implikasi yang muncul dari pelaksanaan program terhadap masyarakat, baik berupa manfaat maupun dampak negatif. Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Hidayat menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Medan Belawan mengapresiasi kehadiran Program KOTAKU, terutama dalam penanganan sanitasi, air bersih, dan drainase. Namun, tantangan juga muncul, seperti yang disampaikan Sekretaris Kecamatan Medan Belawan, Bapak Yosse Ferry, bahwa beberapa wilayah mengalami kebocoran pipa WC komunal dan masyarakat masih melakukan praktik buang air besar ke sungai akibat minimnya fasilitas sanitasi. WC komunal sebagai bagian dari sanitasi rentan mengalami kebocoran akibat padatnya permukiman, sampah yang dibuang ke saluran, serta kapasitas yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk (Arthono dkk., 2023).

Kecamatan Medan Belawan dengan jumlah penduduk 109.908 jiwa (BPS, 2022) membutuhkan sistem pengelolaan limbah yang lebih memadai serta pendataan kebutuhan sanitasi pada setiap kelurahan. Sanitasi yang tidak dikelola baik berpotensi menimbulkan penyakit dan memperburuk kualitas lingkungan. Terkait drainase, masyarakat masih menghadapi banjir dan genangan air meskipun program KOTAKU telah berjalan. Bapak Yosse Ferry menjelaskan bahwa banyak drainase tertutup bangunan warga yang berdiri tidak teratur, sehingga aliran air terhambat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Drainase Dinas PU, Bapak Gibson Panjaitan, bahwa banjir juga dipicu limpasan banjir rob serta tumpukan sampah pada saluran. Menurut Wesli (2008), ketidaksesuaian pembangunan drainase sering terjadi akibat minimnya koordinasi dan pendataan kondisi wilayah. Selain faktor teknis, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan drainase turut memperburuk masalah banjir di Medan Belawan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari dokumentasi dilakukan peneliti di Kelurahan Belawan II sebagai berikut:



Gambar 1 Kondisi Drainase di Kelurahan Belawan II

Sumber: Dokumentasi oleh Peneliti, 2023

Berdasarkan gambar 1 di Kelurahan Belawan II, masih banyak drainase yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Drainase yang tidak dapat berfungsi dengan baik ini nyatanya dikarenakan penumpukan sampah sehingga terjadinya penyumbatan. Untuk daerah yang rawan banjir seperti di Kecamatan Medan Belawan, penyumbatan drainase dapat

menyebabkan aliran air menjadi tumpah ke arah jalan, hal inilah yang menyebabkan banjir dan kawasan yang tampak kumuh Kecamatan Medan Belawan. Banjir yang berada di kawasan kumuh Kecamatan Medan Belawan juga mengganggu keseimbangan dan mencemari lingkungan juga mengancam faktor keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan penghuni yang ada di wilayah tersebut. Hal ini karena ketika air mulai meluap ke jalanan, drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya akan menjadi sumber penyakit karena mengandung air limbah dan kotoran. Selain itu drainase yang tidak berfungsi akibat sampah berdampak serius pada berbagai aspek kehidupan. Sampah yang menumpuk dapat menyumbat aliran air menyebabkan banjir genangan air dapat meluap ke permukiman warga dan merusak fasilitas publik.

Kondisi ini dapat mencemari lingkungan permukiman warga dan fasilitas publik juga termasuk mencemari tanah dan air. Selain itu genangan air yang tercemar sampah menimbulkan bau tidak sedap dan memperburuk estetika kawasan lingkungan. Kerusakan infrastruktur pun dapat terjadi seperti drainase yang retak atau rusak akibat tekanan sampah dan air yang dapat menyebabkan genangan di jalan, hal ini dapat mengganggu aktivitas masyarakat, kemacetan dan kerugian ekonomi seperti rusaknya rumah, barang atau aset lainnya. Seperti yang dikatakan Bapak Chairu Effendi Selaku Warga sekitar Belawan II sebagai berikut:

“Permasalahannya saat banjir datang karena kami pipanya ke parit depan rumah dan parit itu juga dekat dengan halaman rumah. Parit rata-rata di tempat kami ini dangkal jadi kalau banjir meluap semuanya yah itu buat bau gak enak juga, belum lagi sampahnya ikut meluap. Karena kalau diliat parit kami juga sangat dangkal jadi gampang sekali meluap.” (Wawancara Bapak Chairul Effendi 18 maret 2023)

Berdasarkan Pendapat Bapak Chairul Effendi selaku warga sekitar bahwa kawasan permukiman di saat kondisi sedang banjir, maka air dapat meluap yang menyebabkan bau tidak sedap. Selain faktor sampah, berdasarkan pendapat narasumber terjadinya disfungsi drainase karena terjadinya pendangkalan drainase di wilayah sekitar. Pendapat tersebut didukung oleh dokumentasi peneliti mengenai drainase sebagai berikut:



Gambar 2 Pendangkalan Drainase di Kelurahan Belawan II

Sumber: Dokumentasi oleh Peneliti, 2023

Berdasarkan gambar 2, drainase di Kecamatan Medan Belawan mengalami pendangkalan sehingga aliran air mudah meluap ke jalan. Prawati dan Fajri (2021) menjelaskan bahwa drainase yang dangkal dan sempit tidak mampu menampung debit air, sehingga memicu genangan, banjir, dan kerusakan jalan. Selain itu, Febrian dan Burhanudin (2023) menegaskan bahwa air yang meluap dari drainase membawa limbah domestik seperti deterjen dan kotoran manusia, yang dapat mencemari lingkungan serta menimbulkan penyakit kulit. Pendangkalan juga menyebabkan erosi yang merusak fondasi bangunan serta mengganggu kesehatan lingkungan karena air tergenang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dan memicu penyakit seperti diare. Drainase yang tidak mengalir memunculkan bau, polusi air, dan memperkuat kesan kumuh di wilayah Medan Belawan.

Meskipun Program KOTAKU telah diterapkan, drainase yang tidak berfungsi optimal tetap menciptakan kawasan kumuh karena banjir dan tidak adanya aliran untuk limbah

domestik. Tumpukan sampah di saluran memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, Dinas PKPPR perlu menangani pendangkalan drainase secara serius karena berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait sistem air bersih, air merupakan kebutuhan vital masyarakat sehingga diperlukan sistem distribusi yang baik. Menurut Sumbogo Adi (2021), sumber air bersih dapat berasal dari air tanah, mata air, maupun sistem komunal melalui pipanisasi seperti PDAM, sumur, dan hidran umum. Di Kecamatan Medan Belawan, beberapa wilayah telah dibangun sumur bor sebagai bagian dari Program KOTAKU. Hal ini dibenarkan oleh Rahmat Hidayat yang menjelaskan bahwa sumur bor dialirkan ke rumah warga, terutama di Kelurahan Belawan I yang sulit memperoleh air bersih karena letaknya dekat laut dan sering mengalami banjir rob. Pembangunan sumur bor ini menjadi solusi dasar untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat. Pernyataan Bapak Rahmat didukung dengan dokumentasi pembangunan sumur bor di Kecamatan Medan, Kelurahan Belawan I sebagai berikut:



*Gambar 3 Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Medan Belawan I
Sumber: Dinas PKPPR, 2023*

Berdasarkan gambar 3, Dinas PKPPR telah membangun sumur bor di Kelurahan Belawan I sebagai upaya meminimalisir kekumuhan dan mendukung Program KOTAKU, terutama dalam penyediaan akses air bersih. Sumur bor dipilih karena lebih mudah dijangkau masyarakat serta mampu menghasilkan air yang lebih baik dibandingkan sumur dangkal. Bagi wilayah pesisir seperti Medan Belawan, sumur bor menjadi solusi penting dalam mengatasi keterbatasan air bersih.

Namun, hasil penelusuran peneliti kepada warga menunjukkan bahwa pemanfaatan sumur bor juga menghadapi kendala. Ibu Eben Manalu, warga Belawan I, menjelaskan bahwa meskipun air sumur bor awalnya mengalir baik, kualitasnya berubah ketika hujan atau banjir, menjadi berbau dan keruh seperti air parit. Hal ini menunjukkan adanya potensi pencemaran. Menurut Sumbogo Adi (2021), gangguan pada sumur bor dapat terjadi akibat kedekatan pipa dengan sumber limbah, kandungan logam dari tanah, kebocoran pipa, dan kondisi geologis yang menyebabkan air keruh.

Kecamatan Medan Belawan yang rawan banjir menjadikan sumur bor mudah terkontaminasi oleh air banjir yang membawa limbah, lumpur, dan bahan kimia. Kontaminasi ini tidak hanya menurunkan kualitas air tetapi juga berpotensi menimbulkan penyakit jika digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan sumur bor perlu disertai sistem perlindungan sanitasi dan pemeliharaan yang lebih baik.



*Gambar 4 Kondisi Air di Kelurahan Belawan I
Sumber: Dokumentasi oleh Peneliti, 2023*

Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwa air sumur bor di Kelurahan Belawan II berwarna kuning dan mengandung kotoran pada dasar bak. Kondisi ini muncul saat terjadi genangan akibat hujan deras.

Air dengan warna kekuningan dan endapan jelas tidak memenuhi standar air bersih dan tidak layak digunakan untuk konsumsi karena dapat menimbulkan penyakit. Menurut WHO, air layak konsumsi harus tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak mengandung logam, tidak mengandung endapan, serta bebas dari mikroorganisme berbahaya. Dengan demikian, kualitas air di Kelurahan Belawan II belum memenuhi standar tersebut. Warga pun tidak menggunakan air sumur bor sebagai air minum. Hal ini sebagaimana disampaikan Ibu Eben Manalu yang menyatakan bahwa masyarakat membeli air isi ulang untuk dikonsumsi, sementara air sumur bor hanya digunakan untuk mandi dan kebutuhan lain ketika tidak banjir. Kualitas air sumur bor dipengaruhi kondisi lingkungan yang rawan banjir sehingga air mudah tercemar limbah, lumpur, dan zat kimia.

Air yang terkontaminasi dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, disentri, hingga risiko kanker jika terpapar zat berbahaya dalam jangka panjang. Menurut Sumbogo Adi (2021), kondisi air keruh pada sumur bor dapat disebabkan hujan deras yang melunakkan tanah sehingga lumpur masuk ke sumur atau akibat kebocoran pipa. Hal ini sangat mungkin terjadi di Belawan yang secara geografis dekat **laut dan** sungai, sehingga sumur bor rentan mengalami gangguan kualitas air. Kondisi ini dapat dilihat dari dokumentasi peneliti di Kelurahan Belawan I sebagai berikut:



*Gambar 5 Kondisi Perpipaan di Kelurahan Belawan I
Sumber: Dokumentasi oleh Peneliti, 2023*

Berdasarkan Gambar 5 terlihat bahwa sistem perpipaan di Kelurahan Belawan I masih sangat tidak memadai. Pipa air diletakkan begitu saja di atas jembatan kayu yang setiap hari dilalui warga. Kondisi ini membuat pipa sangat rentan mengalami kerusakan, terutama saat hujan deras dan banjir. Tanpa pelindung atau penyangga yang memadai, pipa dapat mengalami kebocoran sehingga air kotor dari genangan banjir yang membawa limbah domestik masuk ke dalam saluran perpipaan. Hal inilah yang menyebabkan air sumur bor menjadi keruh dan berbau. Selain itu, pipa berisiko tertabrak sampah, kayu, atau puing-puing yang terbawa arus banjir. Material tersebut dapat memecahkan, menggeser, atau menyumbat pipa sehingga aliran air bersih terputus. Tanpa pengamanan, pipa juga mudah lepas dari posisinya ketika terendam

banjir besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Program KOTAKU menyediakan akses air bersih melalui sumur bor, kualitas dan keamanan sistem perpipaan belum sejalan dengan fungsinya. Karena itu, Dinas PKPPR perlu melakukan kajian ulang terhadap peletakan pipa, desain struktur, dan perlindungan instalasi agar tahan terhadap banjir. Pipa seharusnya dipasang dengan penguat yang kuat, tahan tekanan air, serta tidak terpapar langsung oleh material hanyut. Secara umum, pembangunan sumur bor dan proyek drainase di Belawan I dan II telah mendukung target RENSTRA terkait peningkatan akses air minum dan sanitasi. Namun, kendala teknis di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi lanjutan agar implementasi Program KOTAKU lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Strategi Kelembagaan

Strategi kelembagaan menurut Kotten (1997) bertujuan memastikan pencapaian misi jangka panjang melalui pemanfaatan unsur kelembagaan secara efektif. Dalam konteks sektor publik, pelayanan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, bukan keuntungan finansial (Bhatia, 2001). Program KOTAKU merupakan wujud nyata pelayanan publik, di mana pemerintah bertindak sebagai penyedia barang publik seperti infrastruktur dasar yang tidak dapat disediakan pasar secara efisien (Samuelson, 1954). Karena itu, sektor publik wajib memastikan program KOTAKU berjalan optimal untuk mengurangi kawasan kumuh, termasuk di Kecamatan Medan Belawan yang memiliki kondisi geografis dan sosial yang kompleks.

Para pelaksana KOTAKU, seperti yang disampaikan Ibu Leli Rohana dan Bapak Rahmat Hidayat, menegaskan bahwa mereka berkewajiban memastikan program berjalan baik meski wilayah Belawan memiliki tantangan berupa banjir dan sanitasi buruk. Implementasi KOTAKU dipandu dasar hukum yang jelas, mulai dari UU No. 1 Tahun 2011 hingga Perda Kota Medan No. 4 Tahun 2019 dan SK Wali Kota Medan Tahun 2020. Dasar hukum ini menjadi acuan dalam penyediaan infrastruktur seperti pembangunan jaringan air bersih, sumur bor, dan perpipaan di Belawan I serta tandon air di Pulau Sicanang.

Namun, efektivitas strategi kelembagaan sangat dipengaruhi kualitas sosialisasi. Temuan lapangan menunjukkan sosialisasi KOTAKU kurang menggunakan pendekatan partisipatif. Informasi hanya disampaikan secara verbal tanpa memastikan pemahaman masyarakat, sehingga perilaku membuang sampah ke drainase dan praktik WC langsung ke sungai masih terjadi. Akibatnya, beberapa infrastruktur KOTAKU seperti septic tank atau drainase rusak karena tidak dirawat atau digunakan secara benar. Padahal, anggaran sosialisasi cukup besar, yakni Rp200 juta pada 2022 dan Rp150 juta pada 2023. Ketidakseimbangan antara anggaran dan dampak menunjukkan rendahnya efektivitas strategi kelembagaan. Ke depan, pelibatan masyarakat harus diperkuat melalui edukasi intensif, pemanfaatan media sosial secara interaktif, dan pendekatan berbasis kebutuhan lokal. Hal ini penting untuk menciptakan keberlanjutan sosial, memastikan infrastruktur KOTAKU berfungsi jangka panjang, serta mencegah munculnya masalah baru di kawasan kumuh.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU), dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan formal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program PJU. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan dari sisi regulasi, teknis, dan koordinasi lintas sektor. Ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur mekanisme teknis dan administratif pengelolaan PJU menyebabkan pelaksanaan kebijakan di lapangan belum memiliki landasan hukum yang kuat dan terarah. Dari aspek tanggung jawab, Dinas Perhubungan telah menjalankan berbagai upaya melalui program seperti “Medan Terang” guna meningkatkan kualitas penerangan jalan. Namun, tanggung jawab terhadap efektivitas pelaksanaan masih lemah, terlihat dari masih tingginya jumlah pengaduan masyarakat terkait

lampu jalan rusak serta adanya proyek pemasangan yang tidak berfungsi optimal akibat perencanaan yang kurang matang dan pengawasan yang belum maksimal. Sementara itu, kejelasan tujuan pengelolaan PJU belum dirumuskan secara komprehensif dan terukur dalam dokumen perencanaan maupun pelaksanaannya. Ketidaksinkronan antara perencanaan anggaran, pelaksanaan teknis, dan hasil yang diharapkan berdampak pada rendahnya efektivitas program dan keberlanjutan proyek. Dari sisi cakupan pekerjaan, Dinas Perhubungan telah mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, namun belum disertai sistem evaluasi yang berkelanjutan. Minimnya pemanfaatan data pengaduan masyarakat serta lemahnya fungsi monitoring menyebabkan kualitas layanan PJU belum sesuai dengan standar pelayanan publik yang ideal. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi, sistem informasi pengelolaan berbasis digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar Dinas Perhubungan mampu menjalankan perannya secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan dalam mewujudkan penerangan jalan yang aman dan merata di Kota Medan.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, Bhakti. (2018). Penanganan Problematika Banjir Kota Medan Berdasarkan Pendekatan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 6(2), 95-1010.
- Arthono. (2023). Perencanaan MCK dan Septic Tank Komunal di desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik Sipil*, 7(1), 35-43.
- Febrian & Burhannudin. (2023). Dampak Luapan Air Drainase Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Jalan Cikutra. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah*, 3(2), 151-158.
- Franky. (2019). Kajian Regulasi Perencanaan Pada Daerah Permukiman Kumuh Di Kecamatan Medan Belawan. *Fakultas Teknik*, 10(1), 31-42.
- Ginting, S. (2025). IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUSUKA) DI KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATUBARA. *Al-Faqih: Jurnal Ilmu Sosial dan Teknik*, 1(4), 101-117.
- Handayani, B, dkk. (2023). Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian SALTSCU. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi*.
- Hanavi, R. (2025). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga Miskin di Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota Binjai (Studi Kasus pada Dinas Sosial Kota Binjai dan Kantor Kelurahan Pekan Binjai). *Al-Faqih: Jurnal Ilmu Sosial dan Teknik*, 1(4), 74-85.
- Jambak, S., Rudhani, G. H., Manurung, A. S., & Saragih, Y. (2025). The Transformation of the Colonial Press System into the Modern Era: A Qualitative Approach to the Role of the Media in Social Change. *Kommunika*, 21(02), 13-19.
- Karina, Tika., dkk. (2021). Penerapan Program KOTAKU Dalam Mengatasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kampung Rawa Barat, Kelurahan Kebon Jeruk, Kota Jakarta. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan Arsitektur*, 3(2), 3229-3224.
- Kautsar, A. A., Sazali, H., & Manurung, A. S. (2025). Sentiment Analysis of Rapper Azealia Bank's Statement About "Indonesia is the World's Trash Can" on Social Media X (@azealiaslacewig). *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 6(2), 659.
- Melyani, Ratih., dkk. (2022). Strategi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Painan dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Ektorans dan Erudisi*, 2(1), 1-21.
- Mulyadi, A., & Ramdani, A. (2021). Implementasi Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kebonjati Kota

- Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 11(1), 63-72.
- Nona, Katherine. Media Digital dan Audiens Muda: Komunikasi Yang Ditargetkan Kepada Anak-Anak Remaja. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 18396-18405.
- Pratiwi & Fajri. (2021). Analisis Sistem Drainase Akibat Curah Hujan Yang Tinggi. *Jurnal Teknik Sipil*, 10(2) 124-133.
- Ritonga dan Susilawati. (2022). Masalah Sanitasi di Wilayah Pesisir Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(8), 1046-1054.
- Saleh, Dapit. (2021). Evaluasi Program Tanpa Kumuh di Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1557-1564.
- Saskia, Ani., & Jumiatai. (2020). Efektivitas Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 2(4), 115-122.
- Susilawaty, A. (2018). Identifikasi Aset Sarana Sanitasi Dasar Dengan Pendekatan Asset Based Community Development (Abcd) di Desa Barugia Kecamatan Bontomania Kabupaten Kepulauan Selayar. *The Public Health Science Journal*, 10(1), 96-107.
- Widjadja, Yani., & dkk. Peranan Kompetensi SDM UMKM Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Desa Cilayung Kecamatan Jatinagor Sumedang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1-3, 467-459.